BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut daerah otonom. Di Indonesia saat ini otonomi daerah menganut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, nmelalui otonomi daerah diharapkan mampu mendorong kemerataan pembangunan sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah (Suprayitno, 2015).

Menurut Sukmawati, dkk (2014) pelaksanaan otonomi diarahkan untuk mempercepat tercapainnnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses dalam penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dan legislatif yang membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja modal menurut Dewi dan Suyanto (2015) digunakan untuk mendapatkan aaset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, serta harta tetap lainnya. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasannya cara yang dilakukan dalam

pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian ini dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang yang cukup rumit.

Tabel 1.1

Fenomena Belanja Modal yang terjadi di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati

No	Kabupaten/Tahun	Kasus
1.	Kabupaten Kudus	Kurang maksimalnya anggaran belanja modal pada tahun 2016 dari target pembangunan di Kabupaten Kudus dalam target pembangunan yang merugikan masyarakat (isknews.com).
2.	Kabupaten Jepara	Belanja modal tergerus oleh belanja pegawai, diakibatkan tunjangan yang besar tidak dibarengkan dengan pelayanan yang baik (ppidjepara.blogspot.com).
3.	Kabupaten Pati	Belanja modal pada tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada belanja modal (murianews.com).
4.	Kabupaten Rembang	Belanja modal sangat rendah pada tahun 2016 yang menyebabkan pembangunan menjadi sangat lambat (murianews.com).
5.	Kabupaten Blora	Belanja modal menurun pada tahun. Hal ini dipastikan karena berkurangnya dana alokasi umum yang berimbas pada berkurangnya anggaran (suarabanyuurip.com).

Sumber : Berbagai berita

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik kepada pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah dapat

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang dapat memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Mufida Suryono, 2016). Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan menurut Setiawan (2013) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor yang kedua adalah dana alokasi umum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan menurut Dewi dan Suyanto (2015) dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor yang ketiga adalah dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Mufida dan Suryono (2016) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan menurut Santosa dan Rofiq (2013) mengatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor yang ke empat adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (Susanti dan Fahlevi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Setiawan (2013) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor yang ke lima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Menurut Oemar dkk (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Setiawan (2013) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Faktor yang ke enam adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu

wilayah tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Widiagma (2015) jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan menurut .

Dari beberapa hasil peneliti terdahulu yang dijelaskan, terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten karena hasil penelitian terdahulu ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif, sehingga perlu diadakan penelitian kembali untuk menambah bukti mengenai pengaruh positif atau negatif terhadap belanja modal. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mufida dan Suryono (2016). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu adannya penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya, variabel independennya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sementara, pada penelitian ini menambahkan variabel independennya adalah dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk.

Peneliti menambahkan variabel independen dana bagi hasil karena adannya keterkaitan antara dana bagi hasil dengan belanja modal yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah melihat angka presentase untuk memnuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Susanti dan Fahlevi, 2016).

Menurut Rahardjo (2013) peneliti selanjutnya menambahkan variabel independen pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun belanja modal.

Jumlah penduduk ditambahkan karena semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah mengindikasikan bahwa belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah akan semakin tinggi (Widiagma, 2015).

Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati dijadikan objek karena peneliti ingin mengetahui pengeluaran daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perencanaan keuangan tahunan daerah yang berdasarkan presentase mengenai APBD (Dewi dan Suyanto, 2015).

Perbedaan lainnya terletak pada sampel penelitian. Dalam penelitian Mufida dan Suryono (2016) objek penelitian yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan dalam penelitian ini mengambil objek pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati. Penelitian sebelumnya tahun yang diambil 2010-2014. Peneliti memperpanjang tahun 2010-2016.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai yang berjudul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN JUMLAH PENDUDUK (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati tahun 2010-2016)".**

1.2 Ruang Lingkup

Batasan masalah terletak pada Kabupaten/Kota di wilayah Se-Karesidenan Pati, sedangkan sampel dalam penelitian ini ada lima yaitu Kabupaten Kudus,

Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Tahun yang digunakan 2010-2016.

1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati ?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh positif pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati ?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh positif pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati ?
6. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati ?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap langkah dan gerak manusia tidak terlepas dari tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif mengenai pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif mengenai dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif mengenai dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif mengenai dana bagi hasil terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif mengenai pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif mengenai jumlah penduduk terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi :

1. Bagi Peneliti

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah

Penduduk terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati tahun 2010-2016.

2. Bagi Pemda (Pemerintah Daerah)

   Diharapkan dapat menjadi pertimbangan pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati dalam pengambilan kebijakan bagi daerah, sehingga kedepannya dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran agar daerahnya makin berkembang dan maju.

3. Bagi Pembaca

   Hasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di bidang keuangan khususnya di pemerintah Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.